

**SKRIPSI**

**PERSEPSI MASYARAKAT ATAS KINERJA POLRI DALAM  
PROGRAM DERADIKALISASI DI KOTA YOGYAKARTA**



**Disusun Oleh :**

**AGUS SURONO**

**07530621**

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”  
YOGYAKARTA**

**2017**

## **HALAMAN PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama: AGUS SURONO

NIM : 07530621

**JUDUL SKRIPSI : PERSEPSI MASYARAKAT ATAS KINERJA POLRI  
DALAM PROGRAM DERADIKALISASI DI KOTA YOGYAKARTA**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Saya menyatakan bahwa bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Yogyakarta, April 2017

Meterai 6000

AGUS SURONO

07530621

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1) Jurusan Ilmu Komunikasi pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “STPMD APMD” Yogyakarta pada :

Pada hari : Senin  
Tanggal : 10 April 2017  
Jam : 10.00 WIB  
Tempat : Ruangan Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

### TIM PENGUJI

Nama	Tanda tangan
1. Ade Chandra, S.Sos., M.Si. Ketua Tim Penguji/Pembimbing	.....
2. Drs. RY. Gatot Raditya, M.Si. Penguji Samping I	.....
3. Dra. MC. Ruswahyuningsih, MA . Penguji Samping II	.....

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi

Ade Chandra, S.Sos., M.Si.  
NIY : 170 230 211

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, hanya karena kasih sayang-Nya, karya sederhana ini dapat terselesaikan. Penyusunan dan penyelesaian tulisan ini tidak dapat dilepaskan dari banyak pihak yang telah memberikan dukungan dalam segala hal. Oleh karenanya ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta, Bapak Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi STPMD “APMD” Yogyakarta beserta seluruh staf akademika
2. Bapak Ade Chandra, S.Sos.,M.Si., penulis mengucapkan terimakasih atas kesabaran dan bimbingan hingga terselesaikannya tulisan ini.
3. Ibu Dra. MC Ruswahyuningsih, MA., dan Drs. RY. Gatot Raditya, M.Si sebagai Dosen Penguji yang telah memberikan banyak masukan demi sempurnanya tulisan ini.
4. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Komunikasi dimana penulis menimba ilmu dan pengetahuan dari beliau.
5. Kepada kedua orang tua dan saudara saya, terima kasih atas dukungan moral, materiil dan doa-doanya.
6. Kepada rekan-rekan yang ada di Polresta Yogyakarta, terima kasih atas bantuan dan dukungannya, sehingga penulis menjadi semangat.
7. Kepada Masyarakat Kota Yogyakarta yang telah bersedia menjadi responden penelitian ini.

8. Kepada sahabat dan teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, terima kasih dukungan dan bantuannya selama ini.
9. Kepada semua pihak yang belum sempat saya sebutkan, terima kasih atas bantuannya.

Yogyakarta, April 2017

Agus Surono

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii

## BAB IPENDAHULUAN

A. LatarBelakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Teorisasi .....	11
1. Persepsi.....	11
2. Kinerja.....	16
3. Program Deradikalisasi .....	22
4. Kerangka Teori .....	30
F. Hipotesis .....	31
G. Defenisi Konsep .....	31
H. Definisi Operasional .....	31
I. Metode Penelitian.....	32
1. Jenis Penelitian .....	32
2. Lokasi Penelitian .....	32
3. Tehnik Pengumpul Data.....	33

4. Populasi dan Sampel .....	34
5. Instrumen penelitian .....	35
6. Uji Validitas dan reliabilitas Instrumen Penelitian.....	36
7. Teknik Analisa Data .....	38

### **BAB II GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN**

A. Deskripsi Kota Yogyakarta .....	40
B. Visi dan Misi Kota Yogyakarta .....	43

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Temuan Data .....	45
1. Deskripsi Responden .....	45
2. Uji Validitas dan Reliabilitas .....	49
3. Uji Frekuensi.....	53
B. Pembahasan .....	64

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73

### **DAFTAR PUSTAKA..... 75**

### **LAMPIRAN**

1. Lampiran 1: Kuesioner
2. Lampiran 2: Data Input Hasil Kuesioner
3. Lampiran 3: Hasil Olah Data SPSS

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Instrumen Penelitian .....	35
Tabel 1.2. Tabel Interval Bobot Skor.....	39
Tabel 3.1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	45
Tabel 3.2. Responden Berdasarkan Kelompok Usia .....	46
Tabel 3.3. Responden Berdasarkan Status Perkawinan .....	47
Tabel 3.4. Responden berdasar tingkat pendidikan .....	48
Tabel 3.5. Responden Berdasar Pekerjaan .....	49
Tabel 3.6. Tabel Uji Validitas Instrumen Penelitian .....	50
Tabel 3.7. Rekap Hasil Kuesioner .....	51
Tabel 3.8. Distribusi Jawaban Tentang Pengetahuan pemetaan radikalisme....	54
Tabel 3.9. Distribusi Jawaban Tentang Pengetahuan Penguatan Sistem Data.	55
Tabel 3.10. Distribusi Jawaban Tentang Pengetahuan keterlibatan tokoh dan akademisi .....	56
Tabel 3.11. Distribusi Jawaban Tentang Sikap terhadap pemetaan radikalisme	58
Tabel 3.12. Distribusi Jawaban Tentang Sikap terhadap adanya penguatan sistem pendataan .....	59
Tabel 3.13. Distribusi Jawaban Tentang sikap pelibatan tokoh masyarakat.....	60
Tabel 3.14. Distribusi Jawaban Tentang penilaian terhadap kegiatan pemetaan radikalisme .....	61
Tabel 3.15. Distribusi Jawaban Tentang Penilaian terhadap penguatan sistem pendataan .....	62
Tabel 3.16. Distribusi Jawaban Tentang penilaian pelibatan tokoh masyarakat	63
Tabel 3. 17. Rekapitulasi skor Responden .....	65
Tabel 3.18. Tabulasi Silang Jenis Kelamin dengan Persepsi .....	66
Tabel 3.19. Tabulasi Silang Status Perkawinan dengan Persepsi.....	67
Tabel 3.20. Tabulasi Silang Umur dengan Persepsi .....	68
Tabel 3.21. Tabulasi Silang Pendidikan dengan Persepsi.....	69



Tabel 3.22. Tabulasi Silang Pekerjaan dengan Persepsi..... 70

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Kerangka Penelitian.....	30
--------------------------------------	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- A. Lampiran 1: Kuesioner
- B. Lampiran 2: Data Input Hasil Kuesioner
- C. Lampiran 3: Hasil Olah Data SPSS

## ABSTRAK

Radikalisme adalah akar dari terorisme dan menjadi penyebab dari maraknya aksi teror di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme dan Peraturan Presiden (Perpres) No. 46 tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), lahir sebagai upaya respons terhadap realitas terorisme di Indonesia. Diantara program yang dilaksanakan BNPT termasuk Polri di dalamnya adalah program deradikalisasi. Terkait dengan program ini tentu masyarakat Kota Yogyakarta mempunyai persepsi yang beragam baik negatif maupun positif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran persepsi masyarakat atas kinerja Polri dalam program deradikalisasi di Kota Yogyakarta.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Penelitian dilakukan di lingkungan Kota Yogyakarta dengan jumlah sampel 100 orang masyarakat Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat untuk mengumpulkan data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif dengan metode tabel frekuensi dan crosstabs.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek kognitif, afeksi dan konatif dari persepsi masyarakat terhadap kinerja Polri dalam program deradikalisasi semuanya mempunyai skor yang tinggi atau positif. Persepsi masyarakat Kota Yogyakarta atas kinerja Polri dalam program deradikalisasi mempunyai persepsi yang tinggi atau positif. Hal ini ditunjukkan bahwa 70% masyarakat mempersepsikan positif atau tinggi, 25% mempersepsikan sangat positif, dan 5% yang mempersepsikan kurang positif (cukup positif). Berdasarkan hasil tabulasi silang diketahui laki-laki mempunyai persepsi tinggi/positif dibanding perempuan, kelompok usia di bawah 31 tahun mempunyai persepsi tinggi/positif terbesar dibanding kelompok umur lainnya, pendidikan SMA mempunyai persepsi tinggi/positif terbesar dibanding kelompok pendidikan yang lain, pekerjaan wiraswasta mempunyai persepsi tinggi/positif terbesar dibanding kelompok pekerjaan lain, dan status kawin mempunyai persepsi tinggi/positif terbesar dibanding status perkawinan yang lain.

**Kata Kunci:** *Persepsi Masyarakat, Kinerja Polri, Deradikalisasi.*



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Terorisme di dunia bukan merupakan hal baru, namun menjadi actual terutama sejak terjadinya peristiwa *World Trade Centre* (WTC) di New York, Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001, dikenal sebagai “September Kelabu”, yang memakan 3000an korban jiwa. Kejadian ini merupakan isu global yang mempengaruhi kebijakan politik seluruh negara-negara di dunia, sehingga menjadi titik tolak persepsi untuk memerangi Terorisme sebagai musuh internasional. Pembunuhan massal tersebut telah mempersatukan dunia melawan Terorisme Internasional. Terlebih lagi dengan diikuti terjadinya Tragedi Bali I, tanggal 12 Oktober 2002 yang merupakan tindakan teror, menimbulkan korban sipil terbesar di dunia, yaitu menewaskan 184 orang dan melukai lebih dari 300 orang.

Tindakan terorisme merupakan suatu tindakan yang terencana, terorganisir dan berlaku dimana saja dan kepada siapa saja. Tindakan teror bisa dilakukan dengan berbagai macam cara sesuai kehendak yang melakukan, yakni teror yang berakibat fisik dan/atau non fisik (psikis). Tindakan teror fisik biasanya berakibat pada fisik (badan) seseorang bahkan sampai pada kematian, seperti pemukulan/pengeroyokan, pembunuhan, peledakan bom dan lainnya. Non fisik (psikis) bisa dilakukan

dengan penyebaran isu, ancaman, penyendaraan, menakut-nakuti dan sebagainya. Akibat dari tindakan teror, kondisi korban teror mengakibatkan orang atau kelompok orang menjadi merasa tidak aman dan dalam kondisi rasa takut (*trumatis*). Selain berakibat pada orang atau kelompok orang, bahkan dapat berdampak/berakibat luas pada kehidupan ekonomi, politik dan kedaulatan suatu Negara. Tindakan terorisme yang sulit terdeteksi dan berdampak sangat besar itu, harus mendapat solusi pencegahan dan penanggulangannya serius baik oleh pemerintah maupun masyarakat (Muzakkir, 2008: 6-7).

Terorisme mempunyai akar pemikiran yang telah menjadi ideologi yang diyakini bersama untuk menjadi pembenar setiap tindakan teror. Banyak pendapat yang menyatakan bahwa radikalisme adalah akar dari terorisme. Ideologi radikal adalah penyebab dari maraknya aksi teror di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Sehingga pencegahan terorisme harus diikuti oleh pembrantasan radikalisme oleh semua pihak. Radikalisme dapat diartikan sebagai pandangan yang ingin melakukan perubahan yang mendasar sesuai dengan interpretasinya terhadap realitas sosial atau ideologi yang dianutnya (Hasani dan Naipospos, 2010: 19). Dengan demikian, radikalisme merupakan gejala umum yang bisa terjadi dalam suatu masyarakat dengan motif beragam, baik sosial, politik, budaya maupun agama, yang ditandai oleh tindakan-tindakan keras, ekstrim, dan anarkis sebagai wujud penolakan terhadap gejala yang dihadapi.

Realitas kekinian membuktikan bahwa radikalisme tidak hanya menjadi isu nasional, tetapi telah menjadi isu global. Hampir setiap negara menghadapi problem radikalisme, kendati dalam varian bentuk. Di Irlandia, terdapat gerakan *The Irish Republican Army* (IRA) yang melakukan perlawanan bersenjata dan serangan terhadap pemerintah Inggris. Di Amerika Serikat terdapat kelompok- kelompok radikal di antaranya *Ku Klux Klan*, *Church of Aryan Nations*, *The Arizona Patriots*, *The American Nazi Party*. Terdapat juga *Red Army Faction* (RAF) di Jerman, *Basque* di Spanyol, *Red Brigades* (RB) di Italia, *Action Direct* (AD) di Prancis. Di Amerika Latin juga terdapat *The Tupac Amaru Revolutionary Movement* dan *The Sendero Luminoso* (*Shining Path*).

Penyebaran radikalisme di Indonesia telah merasuki semua lapisan masyarakat tanpa dapat dipilah secara rigid, baik dari kategori usia, strata sosial, tingkat ekonomi, tingkat pendidikan, maupun jenis kelamin. Kedangkalan pemahaman keagamaan merupakan salah satu faktor penyebaran paham tersebut. Namun, dugaan ini mengalami peninjauan ulang mengingat banyaknya pesantren yang notabene sebagai pusat persemaian pemahaman keagamaan bahkan memberi kontribusi bagi penyebaran radikalisme. Beberapa pelaku teror—terutama ideolog mereka—terkenal sebagai pemuka agama. Hal ini menjadi tanda bahwa mereka cukup memahami agama walau dari sudut pandang berbeda.

Penyebaran radikalisme juga telah menginfiltrasi berbagai institusi sosial seperti rumah ibadah, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan,



lembaga pendidikan tinggi, serta media massa. Dalam hal ini, media massa berandilbesar karena hadir di setiap waktu dan tempat serta tidak memandang kelas sosial dan usia. Kelompok teroris memakai media sebagai wahana propaganda, rekrutmen, radikalisasi, pencarian dana, pelatihan, dan perencanaan. Oleh karena itu, perlu ada semacam wacana tandingan untuk membendung ide-ide terorisme yang memanfaatkan keterbukaan informasi untuk menyebarkan paham-pahamnya.

Dari segi bentuk, kelompok radikal terus mengalami metamorfosis dari berkelompok yang mudah diidentifikasi karena merupakan bagian dari kelompok yang lebih besar hingga kelompok-kelompok kecil. Mereka terpisah dari kelompok-kelompok besar yang mengembangkan agenda masing-masing dan sering tidak berkaitan secara ideologis maupun dari segi aksi dan sasaran. Namun, terdapat simpul yang menyatukan mereka, yaitu sama-sama mengembangkan sikap intoleransi, kekerasan atas nama agama, dan aksinya bermuara pada disintegrasi bangsa.

Merespons situasi tersebut, pemerintah telah menempuh pendekatan penegakan hukum dan koersif (paksaan/kekerasan) kepada pihak-pihak yang diduga kuat terlibat dalam aksi terorisme. Dalam konteks ini, pendekatan demikian dianggap “berhasil”, sebagaimana dapat terlihat dari data Kepolisian sejak tahun 2000 sampai dengan Desember 2011 di mana sudah ditangkap sebanyak 708 tersangka terorisme dengan 455 tersangka sudah dijatuhi vonis bersalah, sedangkan sebanyak 66 terduga terorisme meninggal

dunia di tempat kejadian perkara (Subden Investigasi Datasemen Khusus Anti Teror, 2011).

Untuk konteks nasional, Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme lahir sebagai upaya respons terhadap realitas terorisme di Indonesia. Kompleksitas terorisme mendesak pemerintah untuk merumuskan sebuah kebijakan yang dapat mengatasi secara tepat sasaran. Lahirnya undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme tidak dapat dipungkiri, lahir sebagai manifestasi dari kondisi dunia yang tidak menentu dengan maraknya terjadi tragedi peledakan bom yang menelan banyak korban jiwa. Kejadian-kejadian tersebut rupanya menjadi fenomena kriminal yang terjadi pula di tanah air. Tragedi Bom Bali I dan II, Peledakan Bom di *Hotel J.W. Marriot*, Kasus Bom Makassar, peledakan Bom Mega Kuningan Jakarta, yang menghancurkan *Hotel JW Marriot* dan *Hotel Ritz Carlton*, dan serangkaian tragedi-tragedi lain menjadi pemicu sehingga pemerintah secepat mungkin membuat perangkat undang-undang yang digunakan sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana terorisme di tanah air.

Saat ini ajaran radikalisme sedang marak di tengah masyarakat. Ajaran ini menyebar melalui dakwah-dakwah yang dilakukan di rumah-rumah ibadah, pengajian, lembaga pendidikan keagamaan, bahkan sudah menyebar di lembaga pendidikan umum seperti SMU dan universitas. Penyebaran ajaran radikal dilakukan secara terbuka maupun tertutup. Dampak yang ditimbulkannya juga sangat besar. Dampak keamanan, masyarakat tidak lagi

merasa aman di negerinya sendiri. Segala aktivitas masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya karena selalu dihantui oleh kekhawatiran dan ketakutan terhadap tindakan- tindakan radikal. Setiap orang curiga kepada orang lain terkait aksi radikal. Hal ini akan berimplikasi pada persoalan di dalam masyarakat. Dari segi politik, situasi politik dalam negeri tidak akan stabil karena persoalan radikalisme. Semua kekuatan politik akan terkuras energi dan pikirannya dengan persoalan ini. Pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan, secara politik luar negeri pun sangat merugikan karena pihak luar negeri menganggap bahwa Indonesia adalah sarang radikalisme dan teroris. Hal ini terbukti dengan banyaknya negara mengeluarkan *travel warning* kepada warganya berkunjung ke Indonesia (Subden Investigasi Datasemen Khusus Anti Teror, 2011).

Oleh karena itu berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme dan Peraturan Presiden (Perpres) No. 46 tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), maka penanggulangan terorisme dan radikalisme menjadi tanggungjawab BNPT. Melalui strategi dan program-program yang disusun serta dijalankan diharapkan dapat mengurangi atau mampu mencegah terjadinya tindak terorisme dan radikalisme. Meskipun BNPT bukan merupakan kementerian, BNPT terdiri dari berbagai kalangan, terutama dari POLRI yang lebih dominan. Hal ini ditunjukkan bahwa selama ini kepala BNPT banyak dari Polri, karena lingkup kerjanya banyak bersinggungan dan berkoordinasi

dengan Polri. Sehingga peran Polri dalam upaya melakukan program-program BNPT sangat besar dan terkait erat.

Salah satu program yang dilaksanakan adalah program deradikalisasi. Deradikalisasi merupakan semua upaya untuk mentransformasi dari keyakinan atau ideologi radikal menjadi tidak radikal dengan pendekatan multi dan interdisipliner (agama, sosial, budaya, dan sel lainnya) bagi orang yang terpengaruh oleh keyakinan radikal. Atas dasar itu, deradikalisasi lebih pada upaya melakukan perubahan kognitif atau memoderasi pemikiran atau keyakinan seseorang. Dengan demikian, deradikalisasi memiliki program jangka panjang. Ia bekerja di tingkat ideologi dengan tujuan mengubah doktrin dan interpretasi pemahaman keagamaan teroris (Barrett & Bokhari, 2009).

Dari konteks pemahaman di atas, deradikalisasi dapat dimaknai sebagai semua upaya untuk mentransformasi dari keyakinan atau ideologi radikal menjadi tidak radikal dengan berbagai pendekatan multi dan interdisipliner. Sebagai program kegiatan, implementasi deradikalisasi dapat berbentuk upaya identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, dan resosialisasi bagi individu atau kelompok masyarakat yang terpengaruh oleh keyakinan radikal dengan mengedepankan prinsip pemberdayaan, Hak Asasi Manusia, supremasi hukum dan kesetaraan.

Program deradikalisasi dilaksanakan BNPT termasuk Polri di dalamnya. Program ini mempunyai dua wilayah, yaitu di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan di luar Lembaga Pemasyarakatan. Program deradikalisme di dalam Lapas ditujukan untuk narapidana terorisme, sedangkan program

deradikalisasi di luar lapas ditujukan kepada individu mantan napi terorisme, keluarga, organisasi dan masyarakat umum yang teridentifikasi gerakan radikalisme. Program radikalisasi di luar lapas lebih kepada pencegahan radikalisme dan terorisme. Penanganan terorisme dan radikalisme oleh Polri melalui koordinasi BNPT selama ini dinilai masih kurang efektif dan efisien, seperti yang diungkapkan oleh Polri baru-baru ini. (<http://nasional.kompas.com/read/2016/11/15/22194191/program.deradikalisasi.dinilai.belum.efektif>). Program deradikalisasi yang dilakukan Polri selama ini juga di persepsikan masyarakat secara berbeda-beda, ada yang positif dan ada yang negatif.

Sebagai salah satu kota pelajar terbesar di Indonesia, Yogyakarta diketahui menyimpan benih-benih intoleransi yang dibawa masuk oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk kemudian disebar dan dijejalkan kepada pelajar dan mahasiswa di Yogyakarta. Hasil penelitian yang dilakukan oleh BNPT dan FKPT DIY pada 2013 lalu menunjukkan potensi radikalisme di Yogyakarta telah menjadi momok yang menakutkan, karena benih-benih ini dapat pecah kapan saja dalam bentuk aksi kekerasan hingga terorisme. Munculnya 'toleransi bersyarat' atau *lazy tolerance*, disebabkan oleh semakin menguatnya sentimentasi terhadap penerimaan golongan lain (*liyan*) yang tidak lagi terbuka seperti sebelumnya. Penekanan terhadap golongan "Kita" dan golongan "Mereka" makin menguat. Bentuk radikalisme ditunjukkan melalui adanya keyakinan sejumlah pihak yang menyatakan bahwa berbagai keterpurukan yang menimpa bangsa ini disebabkan oleh pengamalan Islam

yang tidak total (*kaffah*). Wacana tidak berdasar dan terkesan mengada-ada ini dijadikan senjata untuk menghasut warga agar bersedia melakukan berbagai cara dalam mendirikan syariat Islam (tentu saja Islam versi mereka). (<https://damailahindonesiaku.com/memutus-narasi-radikalisme-teorisme-di-yogyakarta.html>).

Adanya keadaan ini menyebabkan program deradikalisasi di Yogyakarta dilakukan secara massif dan intensif oleh Polri bekerjasama dengan berbagai pihak, baik untuk yang dilakukan di dalam Lapas maupun di Luar Lapas. Berbagai kegiatan dengan berbagai kelompok sasaran saat ini dilakukan sebagai kegiatan dari program deradikalisasi yang dilaksanakan BNPT bersama Polri. Terkait dengan program ini tentu masyarakat Kota Yogyakarta mempunyai persepsi yang beragam. Persepsi ini menjadi penting terkait respon dan keberlanjutan program deradikalisasi ke depan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melihat gambaran persepsi masyarakat Yogyakarta terkait kinerja Program Deradikalisasi yang dilakukan Polri bersama BNPT di Yogyakarta selama ini. Dengan demikian penelitian ini berjudul **“Persepsi Masyarakat Atas Kinerja Polri Dalam Program Deradikalisasi Di Kota Yogyakarta”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: Bagaimana persepsi masyarakat atas kinerja polri dalam program deradikalisasi di Kota Yogyakarta?

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, Saifuddin, (1998). *Metode Penelitian, Edisi I, Cetakan I*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Barrett, R., & Bokhari, L. (2009). Deradicalization and rehabilitation programmes targeting religious terrorists and extremists in the Muslim world: an overview. In T. Bjorgo, & J. Horgan, *Leaving Terrorism Behind: Individual and Collective Disengagement (pp. 170-180)*. Oxon: Routledge.
- Bungin, Burhan. (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosis lainnya*. Jakarta: Penerbit Kencana
- Danarjati, DP., Murtiadi, Adi & Ekawati, AR., 2013. *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Flippo, Edwin B. (1980). *Manajemen Personalia. Edisi Ke Enam*, Terjemahan Jilid 2. Cetakan. Kelimabelas. Yogyakarta: BPFE
- Hasani, I. & B.T. Naipospos (2010). *Dari Radikalisme menuju Terorisme*, Jakarta: Pustaka Masyarakat
- Jones, Charles O. (1996). *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Jones, Charles O. (2009). *Pengantar Kebijakan Publik. Edisi 2*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Karding, Abdul Kadir. (2008). Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri di Kota Semarang. *Tesis*. FISIP Universitas Diponegoro. Semarang.
- Kriyantono, Rachmat. (2007). *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Jakarta: Kencana.
- Marliani, Roesleny. (2010). *Psikologi Umum*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Mudzakir, (2008). *Pengkajian Hukum tentang Perlindungan Hukum bagi Korban Terorisme*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

- Prawirosentono, Suryadi. (2008). *Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: BPFE.
- Rakhmat, Jalaludin. (2004). *Persepsi Dalam Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Rivai, Veithzal. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik*, Pertama. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Robbin, Stephen P. (2003). *Perilaku Organisasi, Edisi Kesembilan, Jilid 2*, Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- Sedarmayanti. (2003). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- Sekaran, Uma, (2011). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis, Edisi 4, Buku 1*, Jakarta: Salemba Empat.
- Sinambela, Lijan. (2012). *Kinerja Pegawai: Teori, Pengukuran dan Implikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Singarimbun, Masri & Effendi Sofian. (2009). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES
- Sobur, Alex. (2009). *Psikologi Umum*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Subden Investigasi Data semen Khusus Anti Teror. (2011). Data tentang Terorisme dan Radikalisasi. Jakarta: Data semen Khusus Anti Teror.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suharto dan Cahyono, Budhi (2005). "Pengaruh Budaya Organisasi, Kepemimpinan dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Sumber Daya Manusia di Sekretariat DPRD Propinsi Jawa Tengah", *Jurnal Riset & Bisnis Indonesia, Vol.1, No.1*.
- Sunaryo. (2004). *Psikologi untuk Keperawatan*. Jakarta : EGC.
- Umar, Husein. (2004). *Metode-Metode Riset Komunikasi Organisasi*. Bandung : Bumi Aksara
- Walgito, Bimo. (2011). *Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Andi offside.
- Wibowo. (2009). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Widodo. (2010). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.
- Wirawan. (2009). *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat



## **Perundangan**

Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme  
Peraturan Presiden (Perpres) No. 46 tahun 2010  
tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

## **Internet**

<http://nasional.kompas.com/read/2016/11/15/22194191/program.deradikalisasi.dini.lai.belum.efektif>

<https://damailahindonesiaku.com/memutus-narasi-radikalisme-teorisme-di-yogyakarta.html>